



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)  
**UNIT KERJA** : BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DEDE SUKARJO**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN**
3. NHK : **665228**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.650.160.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m<sup>2</sup>/70 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.260.000.000
2. Tanah Seluas 1748 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 87.400.000
3. Tanah Seluas 1374 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 68.700.000
4. Tanah Seluas 1680 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000
5. Tanah Seluas 1516 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 75.800.000
6. Tanah Seluas 678 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 16.950.000
7. Tanah Seluas 502 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 12.550.000
8. Tanah Seluas 2238 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 44.760.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 515.500.000**

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 20V AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000



3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.  
4.000.000

4. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
26.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 175.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.032.617.519

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.373.277.519

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.373.277.519

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.